



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 63) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Ratna Yulianty
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

Visi

Visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Magelang periode Tahun 2019-2024 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG
YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH”
(SEDAYA AMANAH)

Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia		
1.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. IPM merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya manusia di suatu daerah yang yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: $IPM = 3\sqrt{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran} \times 100$ Dimana: Ikesehatan : Indeks Angka Harapan Hidup Ipendidikan : $\frac{1}{2}$ (Indeks Harapan Lama Sekolah + Indeks Rata-rata Lama Sekolah) Ipengeluaran : Indeks Konsumsi per kapita yang disesuaikan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
1.2	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Inflasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan nilai mata uang, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan perekonomian suatu daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Inflasi diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		<p>Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dapat menunjukkan standar masyarakat untuk dapat hidup dengan layak, sehingga penting untuk menentukan program-program intervensi untuk pengentasan kemiskinan. Biasa disebut juga sebagai paritas daya beli.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Pengeluaran per kapita riil/konstan dengan tahun dasar 2012 = 100 yang kemudian disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (PPP).</p> <p>Satuan: Ribu Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		<p>Angka Kemiskinan</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan, tergolong sebagai penduduk miskin.</p> <p>Angka kemiskinan merupakan indikator makro hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, yang biasanya digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah.</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung Jawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
1.3	Meningkatnya pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan manusia yang sudah mengakomodir persoalan gender.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
2	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelesarian lingkungan hidup		
2.1	Meningkatnya daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di satu wilayah perekonomian dalam</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan <i>output</i> wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) / PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)) x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		PDRB Perkapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita adalah jumlah nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk.</p> <p>Satuan: Juta Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah infrastruktur transportasi, jalan, irigasi, dan sarana-prasarana perhubungan. Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan 2 (dua) buah konsep, yaitu konsep pengembangan wilayah dan konsep berkelanjutan. Konsep pengembangan wilayah dilakukan dengan mengintegrasikan RTRW Kabupaten Magelang ke dalam pembangunan infrastruktur baik pada kawasan strategis, kawasan potensial, kawasan perbatasan, maupun kawasan rawan bencana. Sedangkan konsep berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan lahan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase ketercapaian IKLH + Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah)/2</p> <p>Keterangan: Persentase ketercapaian IKLH diperoleh dengan formula: (Nilai IKLH/Nilai Maksimal IKLH) x100%</p> <p>Nilai IKLH dihitung dengan formula: (IKAx30%)+(IKUx30%)+(IKTLx40%)</p> <p>Detail cara perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Bappeda dan Litbangda dan Badan Pusat Statistik</p>
3	Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah		
3.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi meliputi: manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumberdaya manusia, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

- URUSAN : Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- FUNGSI : 1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
5. Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permen PAN-RB 88/2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang tersusun/Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya) x100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
1.2	Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan merupakan salah satu ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang tersusun/Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang seharusnya)x100%</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
1.3	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- URUSAN : Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah;
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas kesekretariatan DPRD; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permen PAN-RB 88/2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah merupakan merupakan kunci pokok optimalnya penyusunan produk-produk hukum daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propempera) x 100%) + (jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati) x 100%) + (jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati/ jumlah fasiltasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan) x 100%)) / 3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat DPRD</p>

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

- URUSAN : Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;
 3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
 8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;
 9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permen PAN-RB 88/2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Level Kapabilitas APIP digunakan mengetahui tingkat kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).</p> <p>Formulasi Pengukuran: Penghitungan Kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah</p> <p>Satuan: Level</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPKP</p>
		Nilai Maturitas SPIP	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui sejauhmana Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dilaksanakan /diterapkan di SKPD</p> <p>Formulasi Pengukuran: Penghitungan Nilai Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilain dan strategi peningkatan maturitas SPIP</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPKP</p>

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- URUSAN : Pendidikan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Dan Kesekretariatan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
3. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Daerah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
8. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan; Dan
9. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Alasan Pemilihan Indikator: RLS untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat untuk menyelesaikan jenjang tahun

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>pendidikan, sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana :</p> <p>RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p> <hr/> <p>Harapan Lama Sekolah (HLS)</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: HLS untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam menyediakan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			$FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$ <p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dimana dalam penghitungan IPM dengan metode baru, umur yang digunakan adalah 7 (tujuh) tahun.</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam menyediakan mutu layanan pendidikan SD dan SMP</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah SD berakreditasi minimal B/Jumlah SD)x100%+(jumlah SMP berakreditasi minimal B/Jumlah SMP)x100%)/2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: APK merupakan proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang Pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK mengukur partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan pada suatu jenjang, mulai jenjang PAUD, SD/MI, Paket A dan SMP/MTs/Paket B</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: (APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTs/Paket B) / 3</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
		Angka Partisipasi Murni (APM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM mengukur partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan untuk jenjang SD/MI, Paket A dan SMP/MTs/Paket B</p> <p>Formulasi Pengukuran: (APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTs/Paket B)/2</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan untuk jenjang PAUD, SD/MI, Paket A dan SMP/MTs/Paket B</p> <p>Formulasi Pengukuran: (APS PAUD + APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTs/Paket B)/3</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Disdikbud</p>
Sasaran:			
1.2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: AL merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan jumlah siswa pada jenjang terakhir. Dengan Indikator ini dapat diketahui hasil ujian, untuk mengukur mutu Pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Angka Kelulusan SD + Angka Kelulusan SMP) / 2</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
Sasaran:			
1.3	Meningkatkannya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya perlindungan terhadap Benda Situs dan Kawasan cagar budaya, serta karya budaya yang terlayani dan kelompok seni budaya yang aktif.</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+ (Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

- URUSAN : Kesehatan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas kesehatan;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Alasan Pemilihan Indikator: AHH merupakan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya Semakin lama umur/tahun hidup yang dijalani merefleksikan semakin

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan Kesehatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk.</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kualitas pelayanan kesehatan salah satu penentu kinerja pembangunan Kesehatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang terakreditasi)/(Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang ada)x 100 persen.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Persentase kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit pemerintah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit pemerintah merupakan salah satu penentu kinerja pembangunan Kesehatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah minimal 70%/Jumlah puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
1.2	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka kesakitan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka kesakitan menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Angka kesakitan juga berperan dalam penilain terhadap derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah penderita lama dan baru yang ditemukan pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun n) x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Jumlah Kematian Ibu	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kematian ibu merupakan salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama kurun waktu 1 tahun tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.</p> <p>Satuan: Kasus</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Angka Kematian Bayi (AKB);	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu daerah.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1.000 KH</p> <p>Satuan: Per 1.000 Kelahiran Hidup</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Angka Kematian Balita (AKABa);	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka kematian balita merupakan salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kematian balita merupakan kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1.000 KH</p> <p>Satuan: Per 1.000 Kelahiran Hidup</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka kematian neonatal merupakan salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kematian yang terjadi pada bayi usia sampai dengan 28 hari.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1.000 KH</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Satuan: Per 1.000 Kelahiran Hidup Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- URUSAN : Pekerjaan Umum
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu wilayah</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPUPR, DPRKP dan Dishub</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan dapat meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbwu)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- URUSAN : Perumahan dan Kawasam Pemukiman
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Agar optimal penyediaan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPUPR, DPRKP dan Dishub</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas.	Cakupan hunian layak dan berkualitas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Agar optimal pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni + Persentase penanganan kawasan Permukiman Kumuh)/2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPRKP</p>

8. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
 8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Adanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat menjamin semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Semakin tingginya indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kunci meningkatnya daya saing ekonomi daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Pelayanan Trantibumlinmas + Cakupan ketangguhan Daerah menghadapi bencana + Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 2. BPBD 3. Badan Kesbangpol</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan penegakan Trantibumlinmas merupakan data dan informasi tentang penanganan yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((\text{jml penindakan}/\text{jml pelanggaran}) \times 0.50 + ((\text{jml penertiban}/(\text{jml target perencanaan penertiban} + \text{jml aduan})) \times 0.50$</p> <p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran</p>

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

- URUSAN : 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial , bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial , rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial , pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang fakir miskin, pemberdayaan sosial , rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial , pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial , rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial , pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial , rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial , pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
8. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial , rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial , rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial , pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Penurunan PMKS merupakan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan dan menjadi salah satu indikator bidang sosial yang mencerminkan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah PMKS tahun n – 1 - jumlah PMKS tahun n)/) x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan penanganan PMKS	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial menjadi salah satu tolok ukur penanggulangan kemiskinan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase PMKS yang tertangani + Persentase PSKS yang berperan dalam penangananan PMKS)/2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
Tujuan:			
2	Meningkatnya keberdayaan Gender	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih adanya kesenjangan gender pada pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi</p> <p>Formulasi Pengukuran: 1/3 (Ipar+IDM+Linc-dist) (Ipar= Indek keterwakilan perempuan di Parelemen; IDM= Indek pengambilan keputusan; Linc-dist= Indek distribusi pendapatan)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Katagori Kabupaten Layak Anak	<p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih adanya kesenjangan gender pada pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi</p> <p>Formulasi Pengukuran: Kategori Kabupaten Layak Anak mengacu Permen PPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
Sasaran:			
2.1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan , anak dan keluarga	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((Jumlah perempuan dilegislatif/ jumlah jabatan legislatif)x 100% +(jumlah peserta perempuan yang dilatih atau sosialisasi/jumlah sasaran peserta perempuan yang akan dilatih atau sosialisasi)x 100%+ (jumlah OPD (Kecamatan, SKPD, Desa) yang akan dilatih PPRG/ Jumlah OPD (Kecamatan, SKPD, Desa))x 100%)))/ 3)</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
		Rasio Kekerasan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah kasus ditangani/Jumlah Rumah Tangga) x 100%</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>
Tujuan:			
3	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: AHH merupakan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Semakin lama umur/tahun hidup yang dijalani merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk (BADAN PUSAT STATISTIK)</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
3.1	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. LPP ini dipilih sebagai indikator karena grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang sudah mendekati pada bonus demografi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $P_t = P_0 (1+r)^t$</p> <p>Dimana:</p> <p>r : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</p> <p>P_t : Jumlah penduduk tahun t</p> <p>P₀ : Jumlah penduduk tahun awal</p> <p>t : Periode waktu antar tahun awal dan tahun t (dalam tahun)</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		<p>Persentase keluarga Pra Sejahtera</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan salah satu kriteria variable pendataan penduduk miskin</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Keluarga Pra sejahtera/ Jumlah keluarga)x100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- URUSAN : Industri dan Urusan Tenaga Kerja
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, produktivitas kerja, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja; dan;
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Output ekonomi daerah tercermin dari nilai PDRB. Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu penyumbang PDRB Kabupaten Magelang yang terkait langsung dengan dunia perindustrian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kapasitas industri di Kabupaten Magelang	Indeks industri yang terbina	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk meningkatnya kapasitas industri di Kabupaten Magelang, perlu dilakukan pembinaan terhadap industri yang ada. Sebagai alat ukur pemantauan pembinaan industri maka digunakan indikator Indeks industri yang terbina.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((Jumlah industri terbina/jumlah industri)x0.7) + ((jumlah industri terdaftar IUI/jumlah industri)x0.3)))</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disperinnaker</p>
Tujuan:			
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: TPT digunakan untuk mengukur besarnya pengangguran yang ada, dan memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran</p> <p>Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p> <p>Terpantaunya TPT diharapkan dapat menguatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja) X 100%</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>dimana :</p> <p>TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)</p> <p>PP : Jumlah pengangguran (orang)</p> <p>PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
2.1	Meningkatnya akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: TPAK menunjukkan Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (<i>labour supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja + Jumlah penduduk yang mencari kerja)/jumlah penduduk 15 tahun ke atas) x 100%</p> <p>Satuan: indek</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- URUSAN : Lingkungan Hidup
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
4. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Alasan Pemilihan Indikator: IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan ukuran kuantitatif dengan formula dan metode pasti tentang gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH digunakan secara nasional. Dengan mengetahui nilai IKLH, dapat diketahui media lingkungan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini menggambarkan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor K.333/menlhk/setjen/set.1/8/2020 tentang IKU KLHK tahun 2020-2024</p> <p>Satuan: Angka (0-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai indikator kinerja pelaksanaan konservasi di daerah kritis, rawan bencana, resapan air dan keanekaragaman hayati. Indikator tersebut juga sebagai indikator kinerja adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi joko tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup + Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup)/4</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>

12. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- URUSAN : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan alat ukur yang komprehensif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terkait pelayanan publik yang diterima dan dirasakan masyarakat. IKM diharapkan dapat menjadi pemacu bagi instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan melalui inovasi – inovasi pelayanan publik

			<p>Formulasi Pengukuran: Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik, Penerbitan KIA dan Keluarga Yang Ber KK	<p>Alasan Pemilihan Indikator Kepemilikan KTP elektronik dan Kartu Keluarga merupakan bagian dari pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), pada aspek: pelaksanaan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dan pentingnya pemutakhiran data kependudukan. Data KTP dan Kartu Keluarga digunakan sebagai sumber data penentuan kebijakan pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran (Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik+Persentase penerbitan KK+ Penerbitan KIA)/3</p> <p>Satuan Angka</p> <p>Tipe Perhitungan Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	<p>Alasan Pemilihan Indikator Rasio ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Disdukcapil untuk melaksanakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), pada pelaksanaan aspek: kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.</p> <p>Formulasi Pengukuran (Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3</p>

			<p>Satuan Angka</p> <p>Tipe Perhitungan Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	<p>Alasan Pemilihan Indikator Pemanfaatan Data juga merupakan wujud dari upaya Disdukcapil dalam melaksanakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) pada pelaksanaan aspek: Pemutakhiran Data.</p> <p>Formulasi Pengukuran (Persentase Pengelolaan Informasi+Persentase Pemanfaatan Data)/2</p> <p>Satuan Angka</p> <p>Tipe Perhitungan Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

13. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN : Pemerintahan

TUGAS : Tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa serta kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan :			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Indeks Desa Membangun (IDM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Desa Membangun (IDM) dijadikan rujukan untuk mengentaskan desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia, IDM meletakkan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>prakarsa dan kuatnya partisipasi masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa.</p> <p>Adapun Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa <p>Dengan menggunakan Parameter Indeks Desa Membangun (IDM), maka dapat diketahui progres status kemajuan dan kemandirian masing-masing desa, namun demikian rata-rata IDM se Kabupaten Magelang tidak otomatis bisa diinterpretasikan bahwa itu adalah merupakan rata-rata status desa se Kabupaten Magelang, tetapi harus dicermati status masing-masing desa untuk dapat menyajikan data IDM secara akurat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa $IDM = 1/3(IKS + IKE + IKL)$ Pengukuran Berdasarkan Permendes PDPT nomor: 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dispermasdes dan Kemendes PDPT</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah tercapainya Desa Mandiri, dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pemerintahan desa, pengembangan kawasan pedesaan dan peningkatan swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa. Dengan semakin</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan Mandiri maka IDM (Indeks Desa Membangun) yang merupakan rujukan pengentasan desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri akan semakin meningkat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang/Jumlah Seluruh Desa) x 100 % Pengukuran Berdasarkan Permendes PDTT nomor: 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dispermasdes dan Kemendes PDTT</p>

14. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

- URUSAN : Perhubungan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, perpustakaan, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perhubungan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perpustakaan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perpustakaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan pembangunan Infrastruktur Wilayah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai tolok ukur kemajuan wilayah</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas) / 3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan Kumulatif</p> <p>Sumber Data Dinas Perhubungan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatkan Cakupan Layanan Perhubungan	Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Penyelenggaraan Layanan Perhubungan mempunyai arti yang sangat penting untuk mewujudkan keamanan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas, serta mendukung tersedianya infrastruktur wilayah dalam pengembangan daya saing ekonomi daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyelenggaraan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>

15. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- URUSAN : 1. Komunikasi dan Informatika
2. Persandian
3. Statistik
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Dengan, <1,8 : Kurang 1,8 – 2,8 : Cukup 2,6 – 3,5 : Baik 3,5 – 4,2 : Sangat Baik 4,2 – 5,0 : Memuaskan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka 0-5</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan RB</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya pelaksanaan <i>e-government</i>	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka penyediaan sarana prasarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah/Jumlah PD) x100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka penyediaan layanan informasi bagi desa dan SKPD.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam Sistem Informasi/ Jumlah data statistik sektoral yang tersedia) x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		<p>Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka penyediaan layanan dan diseminasi informasi bagi masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah informasi melalui media luar ruang yang terlaksana/Jumlah informasi melalui media luar ruang yang direncanakan)x100%+ (jumlah informasi melalui media publik yang dilaksanakan/jumlah informasi melalui media publik yang direncanakan)x100%+(jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang dilaksanakan /jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang direncanakan)x100%+ (jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang dilaksanakan/ jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang direncanakan) x100%+(jumlah informasi melalui media surat kabar yang dilaksanakan/ jumlah informasi melalui media surat kabar yang direncanakan)x 100%)/5</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		<p>Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka penyediaan layanan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\{((\text{Jumlah PD dan Desa atau Kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil})/(\text{Jumlah PD dan Jumlah Desa atau Kelurahan})) \times 100\% + (\text{Jumlah aplikasi PD dan Desa atau kelurahan yang terfasilitasi} / \text{Jumlah aplikasi PD dan Desa atau kelurahan yang diajukan fasilitasi}) \times 100\%\}}{2}$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>

16. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- URUSAN : Penanaman Modal
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, pengaduan pelayanan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, pengendalian, data, dan pengaduan pelayanan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Investasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pertumbuhan investasi merupakan tolok ukur yang menunjukkan meningkat atau tidaknya realisasi investasi yang masuk di suatu daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((\text{Investasi tahun } n - \text{Investasi tahun } n-1) / \text{Investasi tahun } n-1) \times 100$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Sumber Data: DPMPTSP
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Investasi di daerah	Nilai investasi PMA	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah nilai investasi PMA merupakan tolok ukur meningkat atau tidaknya Realisasi Investsasi di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah investasi yang masuk dari Luar Negeri (PMA)</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP</p>
		Nilai investsi PMDN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah nilai investasi PMDN merupakan tolok ukur meningkat atau tidaknya Realisasi Investsasi di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah investasi yang masuk dari Dalam Negeri (PMDN)</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP</p>
		Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Perizinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Survey kepuasan pelayanan perizinan merupakan tolok ukur meningkat atau tidaknya pelayanan perizinan di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Permenpan RB No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Satuan: angka</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: DPMPTSP

17. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- URUSAN : 1. Perpustakaan
2. Kearsipan
- TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan , kearsipan, dan kesekretariatan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas perpustakaan dan bidang kearsipan.
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Kinerja pembangunan pendidikan	Harapan lama sekolah (HLS)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: HLS untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam menyediakan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana dalam penghitungan IPM dengan metode baru, umur yang digunakan adalah 7 (tujuh) tahun.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Rata-rata lama sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: RLS untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat untuk menyelesaikan jenjang tahun pendidikan, sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lama sekolah (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas.</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana :</p> <p>RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p>
			$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> $FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$ <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>N : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Rasio pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Rasio Pengunjung menunjukkan seberapa besar pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten/jumlah penduduk) x100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Dengan pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Satuan: Angka: 0 – 100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.3	Meningkatnya pelayanan Kearsipan	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan Arsip secara baku	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan Arsip secara baku dapat memberikan gambaran terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencipta arsip yang mengolah arsip secara tertib/Jumlah pencipta arsip) x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>

18. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- URUSAN : 1. Pertanian
2. Perikanan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	Alasan Pemilihan Indikator: PDRB (menurut Pendekatan Produksi) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB per-kapita adalah ukuran produktivitas tersebut sebenarnya

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap individu di wilayahnya untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n.</p> <p>Pendekatan Produksi dapat disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipain oleh unit produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikutsertanya dalam proses produksi.</p> <p>Satuan: Miliar Rupiah</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
Sasaran:			
1.1	Berkembangnya produk peternakan yang	Produksi daging (ruminansia	Alasan Pemilihan Indikator: Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) menjadi salah satu faktor

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
	berdaya saing dan berwawasan lingkungan	dan non ruminansia)	<p>pengungkit daya saing ekonomi daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi daging dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
	Berkembangnya produk perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Produksi benih ikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produksi benih ikan menjadi salah satu faktor pengungkit daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi pada Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi ikan (benih) dalam 1 tahun</p>
		Produksi Telur	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produksi Telur menjadi salah satu faktor pengungkit daya saing ekonomi daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi telur dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Produksi susu	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produksi Susu menjadi salah satu faktor pengungkit daya saing ekonomi daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi susu dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Liter</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Kali 1.000 ekor</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Produksi ikan konsumsi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produksi ikan konsumsi menjadi salah satu faktor pengungkit daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi pada Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Produksi ikan Hias	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produksi ikan hias menjadi salah satu faktor pengungkit daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi pada Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>

19. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- URUSAN : Kepemudaan dan Olahraga
- TUGAS : Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumah tanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- FUNGSI : 1. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
2. Pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
3. Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
8. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
9. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
10. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
11. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
13. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
14. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;

15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
16. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
17. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: HLS untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam menyediakan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana dalam penghitungan IPM dengan metode baru, umur yang digunakan adalah 7 (tujuh) tahun.</p> <p>Dimana :</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p> $FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$ <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Rata-rata lama sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: RLS untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat untuk menyelesaikan jenjang tahun pendidikan, sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lama sekolah (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas.</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana :</p> <p>RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga	Cakupan prestasi generasi muda	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan prestasi generasi muda untuk mengevaluasi capaian sasaran pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang khususnya dalam peningkatan prestasi generasi muda dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi pengukuran: (((jumlah pemuda berprestasi/jumlah kepesertaan lomba kepemudaan)x 100%)x0.50) + (((jumlah atlet berprestasi/jumlah atlet peserta kejuaraan)x100%)x0.50)</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>
Tujuan:			
2	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai tolok ukur aktivitas perekonomian yang berasal dari sektor pariwisata 2. Sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan SKPD mampu mendorong perekonomian domestik 3. Pariwisata menjadi sektor unggulan setelah pertanian. <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB Sektor pariwisata tahun n</p> <p>Satuan: Miliar Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
2.1	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian sasaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan secara terukur dan akurat</p> <p>Formulasi pengukuran: (((jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n - jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n-1) / jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n-1)x100%)x0.35) + (((jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n - jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n-</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>1)/jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke n-1)x100%)x0.65).</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>
		<p>Persentase Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya PDRB yang dihasilkan dari multiplier effect yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke n - lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke n-1) / lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke n-1)x100%)x0.35) + (((lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke n - lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke n-1) / lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke n-1)x100%)x0.65)</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>

20. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- URUSAN : 1. Pertanian
2. Pangan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas pertanian dan pangan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menggambarkan kemampuan daya saing ekonomi daerah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: miliar rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
1.1.	Berkembangnya produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produksi pertanian dan perkebunan merupakan salah satu produk unggulan menjadi prioritas dalam arah pembangunan Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\left(\frac{\sum(\text{produksi komoditas ke-1 tahun } n - \text{produksi komoditas ke-1 tahun } n-1)}{\text{produksi komoditas 1 tahun } n-1} \right) \times 100\% + \dots + \left(\frac{\text{produksi komoditas ke-10 tahun } n - \text{produksi komoditas ke-10 tahun } n-1}{\text{produksi komoditas ke-10 tahun } n-1} \right) \times 100\% / 10$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Persentase kenaikan luas lahan unggulan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kenaikan luas lahan unggulan diharapkan dapat menjadi pengungkit kenaikan Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga menjadi salah satu unggulan daya saing ekonomi daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\left(\frac{\sum(\text{prod komoditas 1 tahun } n - \text{prod komoditas 1 tahun } n-1)}{\text{prod komoditas 1 tahun } n-1} \right) \times 100\% + \dots + \left(\frac{\text{prod komoditas 5 tahun } n - \text{prod komoditas 5 tahun } n-1}{\text{produksi komoditas 5 tahun } n-1} \right) \times 100\% / 5$komoditas pertanian unggulan: padi, kopi, kelapa dalam, salak, empon-empon</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
Tujuan:			
2.	Meningkatnya ketahanan pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Ketahanan pangan dapat menjadi solusi atas permasalahan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi, dan keamanan pangan masyarakat serta menggambarkan pemenuhan peningkatan ketahanan pangan daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Angka dari Publikasi Indeks Ketahanan Pangan dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian</p> <p>Satuan: Angka (0-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BKP Kementan</p>
Sasaran :			
2.1	Ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Stabilitas harga dan pasokan pangan dapat menggambarkan pemenuhan peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $SKi = \left[2 - \frac{CVKRi}{CVKTi} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan: KH : untuk Harga KP : untuk Pasokan CVKRi : Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke-i CVKTi : Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke-1</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator riil kondisi konsumsi pangan di masyarakat, yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat dengan membandingkan standar konsumsi pangan nasional. Indikator ini merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (konsumsi pangan riil masyarakat/standar konsumsi pangan nasional) x100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini menggambarkan ketersediaan dari masing-masing kelompok pangan dan merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>

21. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN : Perdagangan

TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Daerah	Nilai PDRB sektor perdagangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Peran Sektor Perdagangan memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB Sektor perdagangan tahun n</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya perdagangan yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Ekspor Non Migas menjadi salah satu pengungkit daya saing ekonomi daerah dan merupakan ukuran keberhasilan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1) / \text{Nilai ekspor tahun } n-1) \times 100\%$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p>
1.2	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui Jumlah Koperasi sehat dibandingkan jumlah seluruh Koperasi yang ada</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((\text{jumlah koperasi Aktif} / \text{Jumlah total koperasi})) \times 100\%$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p>
1.3	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Peningkatan Omzet Usaha Mikro	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui omzet yang dimiliki oleh UMKM</p> <p>Formulasi Pengukuran: $(\text{nilai omzet tahun } n - \text{nilai omzet tahun } n-1) / (\text{nilai omzet tahun } n-1) \times 100\%$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p>

22. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan konsep kebijakan bidang informasi dan pengadaan pegawai, sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai,
 3. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
 4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
 5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
 6. Pelaksanaan administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
 7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
 9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	Indeks Merit Sistem	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Sistem Merit merupakan ukuran sejauhmana kepatuhan instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit sebagai wujud

			<p>implementasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Indeks Merit Sistem</i> $= \sum \frac{(\text{Skor} \times \text{Bobot dalam setiap aspek})}{(\text{Skor maksimal} \times \text{bobot maksimal})}$</p> <p>Dasar : Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: Angka 0,2 - 1</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BKPPD dan KASN</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Pengukuran Indkes Profesionalitas ASN mengacu pada Perka BKN Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>$\text{IdxPro} = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{Koef}(\text{Kj}) + \text{Koef}(1 - 6\text{SI}(\text{inex})) + \text{Koef}(1-\text{inDiscpl})$</p> <p>Satuan : Angka (0-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BKPPD dan BKN</p>

23. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

- URUSAN : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
8. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Opini BPK	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Opini BPK “WTP” merupakan indikator pengelolaan keuangan dan aset pada Pemerintah daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Opini BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>- Nilai 3 : untuk Opini WTP; - Nilai 2 : untuk Opini WDP; - Nilai 1 : untuk Opini <i>Disclaimer</i></p> <p>Satuan: Angka 1-3 dan katagori</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPK</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah	Persentase kenaikan PAD	<p>Alasan Pemilihan Indikator: PAD merupakan pendapatan daerah yang masih terus dapat digali dan ditingkatkan sebagai sumber utama pendapatan daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((PAD_{th-n} - PAD_{th-n-1}) / PAD_{th-n-1}) \times 100$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPPKAD</p>
1.2	Meningkatnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Tahapan penyusunan Raperda APBD dan Perda APBD tepat waktu sebagai tolak ukur pengesahan Perda APBD untuk pedoman/ regulasi pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $(Jumlah\ APBD\ yang\ ditetapkan\ tepat\ waktu / jumlah\ APBD) \times 100$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPPKAD</p>
1.3	Meningkatnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Aset	Persentase kejelasan status aset daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kejelasan status aset daerah sebagai: 1. Tolak ukur WTP dan 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
	Daerah		Formulasi Pengukuran: (Jumlah Aset yang jelas statusnya/ Jumlah aset seluruhnya) x 100 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: BPPKAD

24. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- URUSAN : Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
- TUGAS : Membantu Bupati Magelang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, serta kesekretariatan.
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 4. Pembinaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 5. Pelaksanaan administrasi urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi, perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal, yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Non Kumulatif</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 88/2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah merupakan gambaran kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan kinerja pembangunan daerah menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Tingkat ketercapaian dan keterukuran kinerja pembangunan daerah ini juga didukung ketersediaan dan konsistensi dokumen perencanaan. Konsistensi dokumen perencanaan ditandai dengan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD. Indikator ini</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>mewakili kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbangda di bidang perencanaan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang berpredikat sangat tinggi ($\geq 91\%$) dan tinggi ($76\% \leq 90\%$)/Jumlah indikator kinerja program)x100%) + (Jumlah program pada RKPD tahun berkenaan/Jumlah program pada RPJMD tahun berkenaan x 100%)/2</p> <p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bappeda dan Litbangda</p>
1.2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan dari jumlah kajian kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Hal ini didasarkan pada upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung penguatan penelitian dan pengembangan kajian kebijakan daerah (<i>planning by research</i>). Indikator ini juga terdapat dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah kajian kelitbangan dalam RKPD/jumlah kajian kelitbangan dalam RPJMD) x 100%</p> <p>Kriteria penilain mengacu Permendagri 86/2017.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bappeda dan Litbangda</p>

25. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN : Ketentraman

TUGAS : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penilaian IKD meliputi prioritas: a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan pelayanan trantibumlinmas + Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+ Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 2. BPBD 3. Badan Kesbangpol</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana merupakan salah satu kunci keberhasilan mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana/jumlah penduduk di kawasan rawan bencana) x 100%)) + ((Jumlah desa tangguh bencana/jumlah desa rawan bencana) x 100%)) + ((jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan/jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap bencana) x 100%)) + ((Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan rehabilitasi dan rekontruksi/jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi) x 100%)))/4</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

26. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
- FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri Dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya, Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Di Wilayah Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri Dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Di Wilayah Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri Dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Di Wilayah Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; Dan
7. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<p>Adanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat menjamin semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Semakin tingginya indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kunci meningkatnya daya saing ekonomi daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Pelayanan Trantibumlinmas + Cakupan ketangguhan Daerah menghadapi bencana + Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 2. BPBD 3. Badan Kesbangpol
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat sebagai salah satu indikator stabilitas keamanan di suatu wilayah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Wasbang) + (Persentase Ormas Yang Aktif) + (Persentase Masyarakat yang Aktif dalam Kegiatan Ketahanan Kebangsaan) + (Persentase Konflik Sosial di Masyarakat) / 4</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Kesbangpol</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.2	Meningkatnya Pemahaman politik masyarakat	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pemahaman politik masyarakat dapat meningkatkan partisipasi karena memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah kegiatan pembinaan Partai Politik + Koordinasi Kelembagaan Pemerintah yang dilaksanakan)/ Jumlah kegiatan pembinaan Partai Politik + Koordinasi kelembagaan pemerintah yang direncanakan))x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Kesbangpol</p>

27. INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

- URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar
- TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka Harapan Hidup	<p>Alasan Pemilihan Indikator: AHH merupakan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya Semakin lama umur/tahun hidup yang dijalani merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan Kesehatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk.</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Akreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Badan Independen (Komisi Akreditasi Rumah Sakit/KARS)</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>pada rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Penilaian KARS sesuai Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.</p> <p>Satuan:S Angka /Kategori: 1. Pratama (Bintang 1) 2. Dasar (Bintang 2) 3. Madya (Bintang 3) 4. Utama (Bintang 4) 5. Paripurna (Bintang 5)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: RSUD Muntilan</p>

28. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SALAMAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>

29. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BOROBUDUR

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Borobudur
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Borobudur
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Borobudur

30. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGLUWAR

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ngluwar
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ngluwar
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ngluwar

31. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SALAM

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Salam
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Salam
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Salam

32. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SRUMBUNG

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Srumbung</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Srumbung</p>
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Srumbung</p>

33. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUKUN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Dukun
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Dukun
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Dukun

34. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAWANGAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Sawangan
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Sawangan
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Sawangan

35. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUNTILAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Muntilan
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Muntilan
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Muntilan

36. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUNGKID

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Mungkid
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Mungkid
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Mungkid

37. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MERTOYUDAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan

38. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPURAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Tempuran
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Tempuran
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Tempuran

39. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KAJORAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>

40. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALIANGKRIK

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik

41. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANDONGAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Bandongan
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Bandongan
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Bandongan

42. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CANDIMULYO

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Candimulyo
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Candimulyo
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Candimulyo

43. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAKIS

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Pakis
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Pakis
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Pakis

44. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGABLAK

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ngablak
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ngablak
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ngablak

45. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GRABAG

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Grabag
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Grabag
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Grabag

46. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEGALREJO

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik. Satuan: - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Satuan: - Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3 Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo

47. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SECANG

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>

48. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WINDUSARI

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Satuan, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Windusari

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina/Tingkat I
NIP. 196807301997032003